

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar; Identitas Universitas Hasanuddin.
- . 2020. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Universitas Hasanuddin. Phinatama Media.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendi Perangin. 2007. *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- . 2013. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman. 2007. *"Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW"*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Amin Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Habib Adjie. 2020. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. CV; Mandar Maju.
- Herlien Budiono. 2018. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata usaha Negara: Buku Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Ashiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Penelitian Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Juswito Satrio. 1998. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang; Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok; Prenada Media Group.

- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar; Pustaka Refleksi,
- Kartasaputra. 2012. *Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Surat Keterangan Hak Waris Bagi Golongan Penduduk Bumi Putra di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Otje Salman Soemadinigrat H.R dan Mustofa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Padma liman. 2016. *Hukum Waris Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut BW Edisi Revisi*. Makassar; Pustaka Pena Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta; Prenada media Group.
- Philipus M Hadjon et. Al. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Gadjah Mada University Press edition Cetakan ketiga.
- Pitlo.A 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan M. Isa Arief*. Jakarta; Intermasa,
- Poerwasunata Welfridus Josephus Sabarija. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia edidi ketiga*, Makassar; Balai Pustaka.
- Prajudi Atmosudirjo. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Rasjim Wiraatmaja. 2001. *Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta; Kantor Advokat Rasjim.
- Subekti R. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pedata*. Jakarta; PT Intermasa.
- Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Hukum Waris Adat DiIndonesia*. Solo; Pustaka litizam.
- Rachmad Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Komplikasi Hukum Islam*. Bandung; CV. Mandar Maju.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Riduan Syamhrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Bandung; Citra Aditya.
- Ronny Hanitijo. 2011. *Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris dalam Pembuat Akta Autentik yang Mengandung Sengketa*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*

- Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta; Kencana Renada Media.
- Sugiono. 2008. *Akta Autentik Notaris, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Bandung; Balei.
- Tamakiran. 1987. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung; Pionir Jaya.
- Tan Thong Kie. 2011. *Studi Notariat Serba Serbi Praktik Notaris*. Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta; Kencana.

TESIS/DISERTASI

- Latifah Hanum. 2016. *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputera*. Tesis Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- Filbert Maynaldy. 2021. *Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Bagi Golongan Penduduk Indonesia Asli*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Gibtha Wildai. 2018. *Penggantian Tempat Ahli Waris Yang Menolak Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya.
- Marbun S.F. 2001. *Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum. Universitas Padjajaran, Bandung.
- Nizar Satrio Wicaksono. 2020. *Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersaa Atas Dasar Sura Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/PID/2017)*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Indonesia.
- Virgnia Ellen Oktania Sie. 2023. Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 dengan judul tesis *Surat Pernyataan Ahli Waris Yang Diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Tanpa Adanya Pengecekan Wasiat*. Tesis Program Studi Magister

Kenotariatan. Universitas Hasanuddin Makassar.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

- Abdul Rachmad Boediono, et al. 2021. *Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Butki*. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.
- Aden Ahmad. 2018. "*Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit*". Jurnal Selat Volume 6. Nomor 1.
- Arif Sumeru. 2016. *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Kebijakan Manajemen Publik. Volume 4. Nomor 1.
- Avisena Aulia Anita. 2023. *Urgensi Penggunaan Surat Keterangan Waris Dalam Peralihan Hak Sebagai Upaya Perlindungan Dan Kepastian Hukum Ahli Waris*. Journal of Islamic Family Law. Volume 7. Nomor 2.
- Bangkit Adhi Wiguna dan Gloria Evanda Fiko. 2024. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Volume 28. Nomor 1.
- Dewi Wulansari. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung; Refika Aditama.
- Elisabeth Otaviani. 2023. *Pelaksanaan Pengurusan Surat Keterangan Waris Terhadap Tiga Golongan Penduduk Di Indonesia Setelah Berlakunya Pma Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Di Kota Semarang)*. Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan. Volume 3. Nomor 2.
- Ella Emilia. 2022. *Surat Keterangan Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan*". Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.
- Hutomo. 2023. "*Kepastian Hukum Kewenangan Pembuat surat keterangan waris*" Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Jember. Volume 12 Nomor 7.
- I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, et al. 2018. "*Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia*". Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 3. Nomor 2.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas*

- Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan.
- Laili, F. 2015. *Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Volume 5. Nomor 1.
- Lia Syafirah. 2024. *Peran Notaris dalam Pembuatan Surat Hak Mewaris di Indonesia*. Indonesian Journal of Law. Volume 1. Nomor 2.
- Muhammad Lufthan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Universitas Islam Indonesia Press. Yogyakarta.
- Moh Gandara. 2020. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat" Jurnal Khazanah Hukum. Volume 2 Nomor 3.
- Meita Djohan OE. 2018. *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunngu Tubang Menurut Adat Semende*. Jurnal Keadilan Progresif. Volume 9. Nomor 1.
- Muhammad Fadhillah Akbar. 2021. *Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris*. Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Journal Volume 9. Nomor 3.
- Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan, Winanto Wiryomartani. 2021. *Keabsahan surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu (studi kasus putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY)*. Jurnal Indonesia Notary. Volume 3. Nomor 2.
- Rezanda Anugrah Bagaswara. 2023. "Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris". Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Volume 16. Nomor 2.
- Ridwan. 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Press. Yogyakarta.
- Rifqi Mufid Riansyah, 2024, *Perbandingan Profesi Notaris Dan Implementasi Jurnal Notaris Di Negara Bagian New York Dan Protokol Notaris Di Indonesia Dalam Era Reformasi Teknologi*, Jurnal Pakuan Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Sri Hajati et al. 2018. *Hukum Waris Adat, Islam, Dan Burgerlijk Wetboek*.

Surabaya; Airlangga University Press.

Sri Nur Hari. 2020. *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintah*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3. Nomor 3.

Sri Nur Susanto. 2020. “*Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintah*” *Administrasi Law & Governance Journal*. Volume 3. Nomor 3.

Wahyu Hadis. 2018. *Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Peralihan Hak Tanah Bagi Keturunan Arab di Yogyakarta*. Jurnal Lex Renaissance. Volume 3. Nomor 2.

Zaki Firmansyah. 2014. “*Fungsi Surat Keterangan Waris yang di Keluarakan Oleh Kepala Desa dalam Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat Functions Of Surat Keterangan Waris*”. Fakultas Hukum. Universitas Jember.

SUMBER LAIN

MuhammadYasin.2023.<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65f688a8d5e38/masalah-kewenangan-pembuatan-surat-keterangan-waris/>.

IrmaDevitaPurnamasari.2024.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata/lt4ecc7cf50640b/> .

Habib Adjie. dalam webinar Bincang Hukum IPPAT Visioner, berjudul “Seluk Beluk Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanggal 18 Oktober 2021.

Sekda Kota Solo dalam webinar diskusi implementasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada tanggal 29 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65f688a8d5e38/masalah-kewenangan-pembuatan-surat-keterangan-waris/> , diakses pada 16 Juni 2024, Pukul 10.30 WITA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Burgerlijk Wetboek (BW).

Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Tanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian

Kewarganegaraan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.